

Intisari

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya telah mengalokasikan 20% pendanaan APBN serta APBD untuk anggaran pendidikan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan serta peningkatan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. *Mandatory spending* anggaran pendidikan yang cukup besar kepada pemerintah daerah tersebut perlu terus dievaluasi untuk pengaruhnya pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan pemerintah daerah terhadap *outcome* pendidikan di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di Indonesia periode tahun 2015-2020 menerapkan pendekatan regresi data panel dinamis *generalized method of moment* (GMM).

Hasil temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap APM SMA, tetapi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap APK SMA. Variabel kontrol pengeluaran per kapita, PPM, dan AMH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APM SMA, tetapi berpengaruh positif signifikan terhadap APK SMA. Sementara itu, variabel kontrol PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap APM SMA, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APK SMA.

Kata Kunci : Belanja fungsi pendidikan, *outcome* pendidikan, pemerintah daerah Indonesia, GMM.

Abstract

The Government of Indonesia annually allocates 20% of APBN and APBD funding for the education budget to reduce inequality and ensure equity and education improvement in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. Mandatory spending on the large education budget for these regional governments needs to be continuously evaluated for their impact on improving the quality of education in Indonesia.

The purpose of this study was to analyze the effect of spending on the education function of local governments on educational outcomes in Indonesia.

The analysis was carried out using panel data of local governments in Indonesia for the period 2015-2020 applying the generalized method of moment (GMM) dynamic panel data regression approach.

The empirical findings in this study indicate that district/city government education function expenditures have a negative and significant effect on the APM SMA, but have a positive and significant impact on APK SMA. The control variables per capita expenditure, PPM, and AMH have a negative and significant effect on the APM SMA, but have a significant positive effect on the APK SMA. Meanwhile, the control variable GRDP per capita has a significant and positive effect on the APM SMA, but has a negative and significant effect on the APK SMA.

Keywords: Education function expenditure, education outcome, Indonesian local government, GMM.